

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

Teori merupakan salah satu hal yang paling mendasar yang harus dipahami ketika melakukan penelitian karena teori dapat menjadi acuan untuk menemukan dan merumuskan sebuah permasalahan. Sesuatu baru dikatakan menjadi sebuah teori jika sudah terbukti melalui serangkaian proses dan eksperimen dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Sebuah teori dapat berubah atau mengalami perkembangan hal itu terjadi apabila teori yang ada sudah tidak relevan dengan keadaan yang ada.

Seperti yang dikemukakan oleh Cooper dan Schindler bahwa teori adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat dipergunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena (Sugiyono, 2012:52). Selanjutnya Haditono menyatakan bahwa suatu teori akan memperoleh arti yang penting bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan dan meramalkan gejala yang ada (Sugiyono, 2012:53). Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori mempunyai 3 fungsi, yakni untuk menjelaskan, meramalkan dan pengendalian suatu gejala. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori-teori sebagai berikut:

1. Kemitraan

a. Pengertian Kemitraan

Kemitraan sesungguhnya merupakan sebuah kebutuhan bagi para pihak dengan kesamaan orientasi yang ingin menghemat energi dan menghasilkan manfaat yang berlipat ganda. Menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2004:129) kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dan berakar dari kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan sebagai pasangan, jodoh, sekutu, kompanyon, sedangkan *partnership* diterjemahkan sebagai persekutuan atau perkongsian.

Berdasarkan terjemahan dari asal katanya, kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan. Kerjasama tersebut terjalin dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik

Menurut Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997 terutama dalam Pasal 1 (dalam

<http://www.damandiri.or.id/file/arirahmathakimundipbab2a.pdf>

diakses pada tanggal 13 Mei 2014 pukul 21.00 WIB) menyatakan bahwa:

“Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan

memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kemitraan adalah proses interaksi dua pihak atau lebih yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama. Pihak-pihak yang melakukan kemitraan meliputi berbagai sektor seperti kelompok masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Beberapa pihak ini bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing.

b. Prinsip-prinsip Kemitraan

Dalam melakukan kemitraan, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipahami oleh anggota kemitraan. Prinsip-prinsip kemitraan perlu dipahami karena prinsip ini yang melandasi terjalinnya suatu pola kemitraan yang baik. Terdapat prinsip-prinsip yang perlu dipahami dalam menjalin sebuah kemitraan (dalam <http://www.damandiri.or.id/file/arirahmathakimundipbab2a.pdf>

diakses pada tanggal 13 Mei 2014 pukul 20.00 WIB), yakni:

a. Kesetaraan

Setiap mitra dalam melaksanakan pembangunan kesehatan harus diberi kepercayaan penuh, dihargai, dihormati, dan diberikan pengakuan dalam hal kemampuan dan nilai-nilai yang dimiliki.

b. Keterbukaan

Setiap mitra dalam melaksanakan pembangunan kesehatan yakin dan percaya setiap perjanjian akan dilakukan dengan terbuka, jujur, tidak saling merahasiakan sesuatu.

c. Saling menguntungkan

Setiap mitra dalam melaksanakan pembangunan kesehatan akan mendapatkan keuntungan dan manfaat bersama dari kemitraan tersebut.

c. Model-model, Bentuk, dan Sifat Kemitraan

Model-model kemitraan dikembangkan berdasarkan pengamatan yang dilakukan dalam hubungan kerjasama antar organisasi. Menurut Sulistiyani (2004:130) terdapat 3 model kemitraan yang mampu menggambarkan hubungan antarorganisasi, yakni :

1) *Pseudo partnership*, atau kemitraan semu

Kemitraan semu adalah merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan yang lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

2) *Mutualism partnership*, atau kemitraan mutualistik.

Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara optimal.

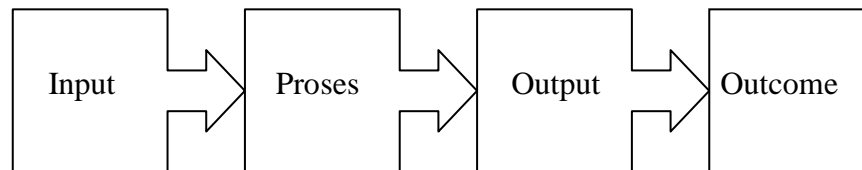
- 3) *Conjugation partnership*, atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan.

Kemitraan konjugasi adalah kemitraan untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

Lebih lanjut dalam membahas model-model kemitraan yang terjalin antarorganisasi, bentuk kemitraan yang sudah disepakati kemudian dituangkan dalam SK bersama, MOU, Pokja, Forum Komunikasi dan Kontrak Kerja/Perjanjian kerja (Ditjen P2L & PM dalam Kuswidanti, 2008:16). Adapun kemitraan yang terjalin antarorganisasi mempunyai sifat yang berbeda-beda. Dikutip dari sumber yang sama, sifat kemitraan ada 3 yakni : Insidental, Jangka Pendek dan Jangka Panjang. Sifat kemitraan Insidental berarti kemitraan karena kebutuhan sesaat. Jangka pendek berarti kemitraan yang terjalin merupakan pelaksanaan proyek dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan sifat kemitraan jangka panjang berarti kemitraan yang dijalin karena pelaksanaan suatu program tertentu.

d. Indikator Keberhasilan Kemitraan

Untuk dapat mengetahui keberhasilan pengembangan kemitraan diperlukan adanya indikator yang dapat diukur. Dalam penentuan indikator sebaiknya dipahami prinsip-prinsip indikator yaitu : spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, dan tepat waktu. Sedangkan pengembangan indikator melalui pendekatan program menurut Ditjen P2L & PM dalam Kuswidanti (2008:22) dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 1. Indikator Keberhasilan Kemitraan

1) Indikator input

Tolok ukur keberhasilan input dapat diukur dari tiga indikator, yaitu:

- a) Terbentuknya tim wadah atau sekretariat yang ditandai dengan adanya kesepakatan bersama dalam kemitraan.
- b) Adanya sumber dana/biaya yang memang diperuntukkan bagi pengembangan kemitraan.
- c) Adanya dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh institusi terkait.

Hasil evaluasi terhadap input dinilai berhasil apabila ketiga tolok ukur tersebut terbukti ada.

2) Indikator proses

Tolok ukur keberhasilan proses dapat diukur dari indikator sebagai frekuensi dan kualitas pertemuan tim atau sesuai kebutuhan. Hasil evaluasi terhadap proses nilai berhasil, apabila tolok ukur tersebut terbukti adanya yang dilengkapi dengan agenda pertemuan, daftar hadir dan notulen hasil pertemuan.

3) Indikator *output*

Tolok ukur keberhasilan *output* dapat diukur dari indikator sebagai berikut: jumlah kegiatan yang dikerjakan oleh institusi terkait sesuai dengan kesepakatan peran masing-masing

institusi. Hasil evaluasi terhadap *output* dinilai berhasil, apabila tolok ukur tersebut diatas terbukti ada.

4) Indikator *Outcome*

Tolok ukur keberhasilan *outcome* adalah menurunnya angka permasalahan yang terjadi.

2. Interaksi Antar Aktor

Membahas mengenai interaksi antar aktor berarti secara tidak langsung menyangkut pembahasan mengenai konsep *good governance* (tata pemerintahan yang baik) yang mana dalam pembahasan *good governance* dijelaskan bagaimana hubungan antar aktor yakni pemerintah, swasta dan masyarakat. Senada dengan hal itu, Thoha dalam Sulistiyani (2004:76) menjelaskan:

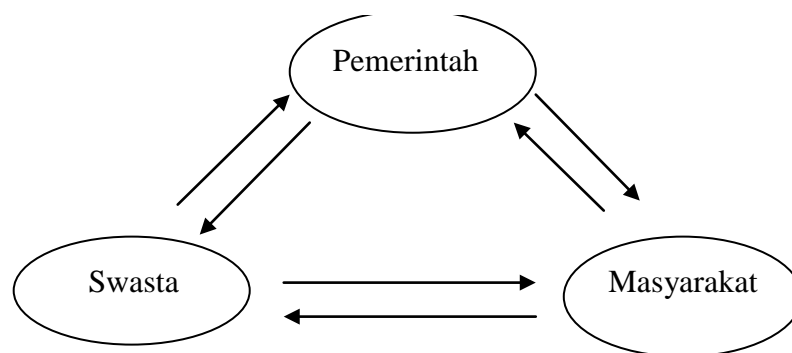
“*Good governance* adalah tata pemerintahan yang baik yang merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta, adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintah (*government*), rakyat (*citizen* atau *civil society*) dan usahawan (*business*) yang berada di sektor swasta.”

Adapun dalam mewujudkan *good governance* harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada. Menurut UNDP (*United Nation Development Program*) dalam Dwiyanto (2008:79) *Good Governance* memiliki delapan prinsip yakni partisipasi, transparansi, akuntabel, efektif dan efisien, kepastian hukum, responsif, konsensus, setara dan inklusif.

Interaksi antar aktor dalam *good governance* dapat terjalin karena masing-masing aktor mempunyai peran yang berbeda. Perbedaan peran pemerintah, swasta dan masyarakat menjadikan satu sama lain saling membutuhkan dan saling melengkapi. Berikut adalah peran masing-

masing aktor dalam *good governance* dan gambaran interaksinya menurut Pipin Hanapiah (dalam http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/gogo_all.pdf Diakses pada tanggal 10 Januari 2014 Pukul 15.30 WIB).

- a. Negara atau pemerintah berperan dalam:
 - 1) regulasi/pembuatan kebijakan publik;
 - 2) pengendalian dan pengawasan publik;
 - 3) perlindungan dan pengayoman masyarakat dan swasta;
 - 4) fasilitasi kepentingan negara dan publik;
 - 5) pelayanan kepentingan publik.
- b. Swasta atau Dunia Usaha, berperan dalam hal:
 - 1) penggerakan aktivitas di bidang ekonomi;
 - 2) penyelenggaraan usaha-usaha kesejahteraan bangsa;
 - 3) penyelenggaraan usaha-usaha perindustrian dan perdagangan;
 - 4) penyelenggaraan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
- c. Masyarakat, berperan dalam hal:
 - 1) posisinya sebagai subjek sekaligus objek (partisipator) bagi penyelenggaraan urusan-urusan yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah dan Swasta;
 - 2) pengontrol terhadap kinerja Pemerintah dan Swasta.



Gambar 2. Interaksi Antar Aktor

Dari penjelasan interaksi antar aktor di atas, dapat diambil pengertian bahwa interaksi antar aktor muncul berdasarkan adanya konsep *good*

governance. Interaksi dapat terjalin karena masing-masing aktor dalam *good governance* mempunyai peran yang berbeda-beda, saling membutuhkan satu sama lain dan bisa saling melengkapi.

3. Peran Pemerintah dalam Menangani Anak Jalanan

Sering kita mendengar tentang kata peran atau peranan dalam kehidupan sehari-hari, namun belum tentu semua orang mengerti arti kata tersebut. Berbagai definisi tentang arti kata peranan telah dikemukakan oleh para ahli. Poerwadarminta (1995:751) mengemukakan bahwa “Peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dan peranan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena jika melihat dari pengertian tersebut keduanya saling berhubungan.

Sedangkan Soekanto (1987:221) mengemukakan definisi “peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.” Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa peranan merupakan suatu aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka Ia menjalankan suatu peranan.

Lebih lanjut Soekanto (1987:53) juga mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pengharapan merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya peran. Konsep peran selalu berkaitan dengan struktur organisasi (lembaga atau institusi formal) karena dari peran tersebut dapat diketahui struktur organisasi yang ada di suatu lembaga atau institusi yang berisi tentang uraian status atau kedudukan seseorang atas suatu peran yang harus dilakukan dan bersifat kolektif. Peran diperoleh dari uraian jabatan atas suatu pekerjaan dan uraian jabatan memberikan serangkaian pengharapan yang menentukan terjadinya peran.

Dari beberapa konsep di atas dapat diambil pengertian bahwa peran merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kedudukan (status) sebagai bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan

Dari arti kata peran yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila dikaitkan dengan fungsi pemerintahan maka definisi peran adalah pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dan fungsi-fungsi pemerintah daerah Kota

Yogyakarta dalam penanganan permasalahan anak jalanan. Menurut Sihombing dalam Utami Rahajeng (2013:12) ada beberapa peran yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh aparat pemerintahan dalam menangani permasalahan anak jalanan yakni sebagai berikut:

- 1) Sebagai Fasilitator
Sebagai fasilitator pemerintah diharapkan bertindak ramah, menyatu dengan masyarakat, bersahabat, menghargai masyarakat, mampu menangkap aspirasi masyarakat, mampu membuka jalan, mampu membantu menemukan peluang, mampu memberikan dukungan, mampu meringankan beban pekerjaan masyarakat, mampu menghidupkan komunikasi dan partisipasi masyarakat tanpa masyarakat merasa terbebani.
- 2) Sebagai Pelayan Masyarakat
Melayani masyarakat, merupakan pilar utama dalam melindungi dan memenuhi hak-hak warganya. Pemerintah dengan semua aparat dan jajarannya perlu menampilkan diri sebagai pelayanan yang tanggap, cepat memberikan perhatian, tidak berbelit-belit, dan bukan minta dilayani. Masyarakat harus diposisikan sebagai fokus pelayanan utama.
- 3) Sebagai Pendamping
Pemerintah harus melepaskan perannya dari penentu segalanya menjadi pendamping masyarakat yang setiap saat harus melayani dan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat. Kemampuan petugas sebagai teman, sahabat, mitra setia dalam membahas, mendiskusikan, membantu merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan perlu terus dikembangkan. Sebagai pendamping, mereka dilatih untuk dapat memberikan kontribusi pada masyarakat dalam memerankan diri sebagai pendamping.
- 4) Sebagai Mitra
Apabila kita berangkat dari konsep pemberdayaan dan perlindungan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, maka masyarakat harus dianggap sebagai mitra. Hubungan dalam pengambilan keputusan bersifat horizontal, sejajar, setara dalam satu jalur yang sama. Tidak ada sifat ingin menang sendiri, ingin tampil sendiri, ingin tenar/popular sendiri, atau ingin diakui sendiri. Sebagai mitra pemerintah harus dapat saling memberi, saling mengisi, saling mendukung, dan tidak bersebrangan dengan masyarakat, tidak terlalu banyak campur tangan yang akan menyusahkan, membuat masyarakat pasif, dan akhirnya mematikan kreativitas masyarakat.

5) Sebagai Penyandang Dana

Pemerintah harus memahami bahwa masyarakat yang dilayani pada umumnya adalah masyarakat yang kurang mampu, baik dalam ekonomi maupun segi-segi tertentu. Pemerintah berperan sebagai penyedia dana yang dapat mendukung keseluruhan kegiatan.

Dari berbagai peran pemerintah daerah diatas, selain sebagai peran utamanya sebagai pelayan publik, pemerintah daerah juga mempunyai peran dalam menangani permasalahan anak jalanan. Peran pemerintah daerah lainnya yakni sebagai fasilitator, pelayanan masyarakat, pendamping, mitra, dan penyandang dana.

4. Peran Organisasi Sosial dalam Menangani Masalah Anak Jalanan

Organisasi sosial secara umum adalah organisasi yang memenuhi kebutuhan sosial orang-orang untuk mencapai kontak dengan orang lain, kebutuhan akan identifikasi dan bantuan timbal balik (Winardi, 2006:13). Adapun secara spesifik, organisasi sosial adalah suatu lembaga/ yayasan/ perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (Dinas Sosial DIY, 2012:11). Bank Dunia mendefinisikan NGO/Ornop sebagai organisasi swasta yang kegiatannya ditunjukkan untuk membebaskan penderitaan, memajukan kepentingan kaum miskin, melindungi lingkungan, menyediakan pelayanan dasar masyarakat, atau menangani pengembangan masyarakat (Indra Bastian dalam Diah Anisa, 2012:17). Jadi, pada dasarnya pengertian Ornop meliputi organisasi yang

berada di luar struktur atau jalur formal pemerintah dan tidak dibentuk oleh atau merupakan bagian dari birokrasi pemerintah dan secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau profit dari kegiatannya.

Setiap organisasi yang didirikan pastilah mempunyai tujuan yang ingin dicapai, tidak terkecuali Organisasi Sosial. Salah satu tujuan dari Organisasi Sosial adalah membangun masyarakat dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan disini juga diartikan sebagai pembangunan dari segi manusianya atau masyarakatnya. Penanganan masalah sosial seperti penanganan masalah anak jalanan merupakan salah satu didalamnya. Untuk melaksanakan tujuan tersebut, maka ada peranan atau bagian dari tugas organisasi tersebut yang harus dilakukan.

Menurut Ismid Hadad dalam Indra Bastian yang dikutip oleh Diah Anisa (2012:18) sama halnya dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang merupakan salah satu bagian dari Organisasi Non Pemerintah, Organisasi Sosial juga mempunyai peran, yakni sebagai berikut:

- 1) Motivator

Dalam hal ini Organisasi Sosial bertugas memberikan motivasi, menggali potensi, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran anggota masyarakat akan masalah-masalah yang dihadapi dirinya maupun lingkungannya, akan potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki, dalam rangka memperbaiki nasib dan membangun masa depan yang lebih baik atas potensi dan swadaya masyarakat itu sendiri.

- 2) Komunikator

Sebagai komunikator, tugas Organisasi Sosial antara lain :

- a) mengamati, merekam, serta menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat agar dijadikan bahan rumusan kebijakan dan perencanaan program pembangunan;
 - b) memonitor atau mengawasi pelaksanaan program pembangunan masyarakat;
 - c) memberi penyuluhan dan menjelaskan program-program pembangunan dengan bahasa yang akrab dan kerangka berfikir yang mudah dipahami masyarakat sasaran;
 - d) membantu memperlancar hubungan dan kerjasama antar organisasi yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dalam masyarakat.
- 3) Dinamisator
- Organisasi Sosial bertugas merintis strategi, mengembangkan metode program, dan memperkenalkan inovasi dibidang teknologiserta pengelolaan organisasi yang belum dikenal ke lingkungan masyarakat setempat untuk pengembangan dan kemajuan masyarakat lokal.
- 4) Fasilitator
- Disini Organisasi Sosial bertugas memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan program seperti penyediaan bantuan dana, modal kerja, peralatan, bahan-bahan baku, saluran pemasaran, dan sebagainya bagi kelompok-kelompok sasaran yang membutuhkannya.

Apabila melihat dari peranan yang dilakukan organisasi sosial, maka kehadiran organisasi sosial sangat membantu dalam proses pembangunan suatu bangsa terlebih dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat. Peranan organisasi sosial juga menjadikan masyarakat mandiri dan mampu ikut serta dalam penanganan masalah anak jalanan. Peran tersebut dimaksudkan agar mereka dapat memperjuangkan haknya sebagai warga negara. Peran-peran organisasi sosial tersebut yakni sebagai motivator, komunikator, dinamisator, dan fasilitator.

5. Anak Jalanan

a. Pengertian Anak Jalanan

Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta (2012: 17), mendefinisikan anak jalanan adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan/ atau berkeliaran dijalanan maupun ditempat-tempat umum. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) mengelompokkan anak jalanan ke dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Adapun yang dimaksud dengan PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melakukan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Kementrian RI menyebutkan terdapat 26 jenis PMKS dan anak jalanan merupakan salah satunya.

Jadi anak jalanan adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian waktunya dijalan, anak yang bekerja dijalanan dan/atau anak yang bekerja dan hidup dijalanan. Anak jalanan disebabkan oleh banyak hal, namun yang sangat tampak dari fenomena-fenomena yang ada ialah disebabkan karna faktor ekonomi atau kemiskinan.

b. Indikator Anak Jalanan

Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) dalam *handout* Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Anak Jalanan Berbasis Kewilayahan Kota Yogyakarta yang dikutip oleh Chyntia (2013:20), menyebutkan dalam menilai anak jalanan atau bukan dapat dilihat melalui beberapa indikator:

- 1) Anak yang benar-benar hidup dan bekerja dijalanan dan ditelantarkan atau telah lari dari keluarga mereka. Anak jalanan betul-betul tinggal dijalanan, lepas sama sekali dari orang tuanya. Mereka ini pada umumnya dianggap gelandangan (*Children of the Street*).
- 2) Anak jalanan yang kadang-kadang saja kembali pada orangtuanya. Anak jalanan seperti ini pada umumnya lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah. Anak tersebut masih menjaga hubungan dengan keluarga mereka, akan tetapi mereka menghabiskan banyak waktunya di jalanan (*Children on the street*).
- 3) Anak dari keluarga yang hidup dijalanan (*Family of the Street*) yaitu anak jalanan yang keluarganya berasal dari jalanan.

c. Model Penanganan Anak Jalanan

Secara garis besar penanganan anak jalanan mengarah kepada 4 jenis model (Edi Suharto, 2007: 233) seperti yang dijelaskan berikut ini:

- 1) *Street-centered intervention*. Penanganan anak jalanan yang dipusatkan di “jalan” dimana anak-anak jalanan biasa beroperasi. Tujuannya agar dapat menjangkau dan melayani anak di lingkungan terdekatnya, yakni di jalan.
- 2) *Family-centered intervention*. Penanganan anak jalanan yang difokuskan pada pemberian bantuan sosial atau pemberdayaan keluarga sehingga dapat mencegah anak-anak agar tidak menjadi anak jalanan atau menarik anak jalanan kembali ke keluarganya.
- 3) *Institutional-centered intervention*. Penanganan anak jalanan yang dipusatkan di lembaga (panti), baik secara sementara (menyiapkan reunifikasi dengan keluarganya) maupun

permanen (terutama jika anak jalanan sudah tidak memiliki orang tua atau kerabat). Pendekatan ini juga mencakup tempat berlindung sementara (*drop in*), “rumah singgah” atau “*open house*” yang menyediakan fasilitas “panti dan asrama adaptasi” bagi anak jalanan.

- 4) *Community-centered intervention*. Penanganan anak jalanan yang dipusatkan di sebuah komunitas. Melibatkan program-program *community development* untuk memberdayakan masyarakat atau penguatan kapasitas lembaga-lembaga sosial di masyarakat dengan menjalin *networking* melalui berbagai institusi baik lembaga pemerintahan maupun lembaga sosial masyarakat. Pendekatan ini juga mencakup *Corporate Social Responsibility* (tanggung jawab sosial perusahaan).

d. Indikator Keberhasilan Penanganan Anak Jalanan

Keberhasilan penanganan anak jalanan menurut Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta (dalam *handouts* Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Yogyakarta) dapat dilihat dari tolok ukur atau indikator sebagai berikut :

- 1) Anak Jalanan
 - a) Terpenuhinya kebutuhan dan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat.
 - b) Kembalinya anak jalanan kepada keluarga
 - c) Hilangnya atau berkurangnya anak jalanan di Kota Yogyakarta.
- 2) Keluarga
 - a) Meningkatkan fungsi keluarga bagi tumbuh kembang anak.
 - b) Kembalinya anak jalanan ke tengah keluarga.
 - c) Meningkatnya pendapatan keluarga.
- 3) Masyarakat
 - a) Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap penanganan anak jalanan berbasis masyarakat.
 - b) Perubahan sikap masyarakat terhadap keberadaan anak jalanan.

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Chyntia Dewi A S (2013) dengan judul “Implementasi Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Jalanan (Anjal) Di Kota Yogyakarta” mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Yogyakarta.

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Implementasi Perda No. 6 Tahun 2011 sudah banyak memberikan efek positif dalam penanganan dan perlindungan anak jalanan, hal ini ditandai dengan adanya upaya-upaya dari pemerintah yang bekerja sama dengan Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK PSM) atau sekarang berubah nama menjadi I-PSM dalam mewujudkan program-program pembinaan terhadap anak jalanan (anjali). Adapun manfaat positif dari adanya program tersebut serta perhatian dari pemerintah sangat berdampak pada kurangnya prosentase anak jalanan (anjali) yang ada di Kota Yogyakarta karena mereka sudah kembali ke tengah keluarga mereka dan tentunya kembali bersekolah dengan difasilitasi pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang dibantu Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK PSM).

Penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan karena penelitian ini sama-sama membahas kinerja pemerintah dalam hal ini Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta dan adanya kerjasama yang dengan organisasi sosial yakni FK PSM / I-PSM. Penelitian tersebut

sama-sama membahas penyelesaian sebuah permasalahan sosial yakni anak jalanan melalui kerjasama dengan pihak I-PSM, sehingga dari penelitian tersebut telah terlihat dampak positif dari adanya kerjasama tersebut.

Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut membahas mengenai implementasi Perda No. 6 tahun 2011 tentang perlindungan anak jalanan (Anjal) Di Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian ini membahas mengenai kemitraan antara pemerintah dan ikatan pekerja sosial masyarakat dalam menangani masalah anak jalanan di kota Yogyakarta.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kuswidanti (2008) dengan judul “Gambaran Kemitraan Lintas Sektor dan Organisasi di Bidang Kesehatan dalam Upaya Penanganan Flu Burung di Bidang Komunikasi Komite Nasional Flu Burung dan Pandemi Influenza (Komnas FBPI), Program Sarjana Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Depok.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kemitraan di bidang komunikasi Komnas FBPI sudah berhasil karena sudah memenuhi indikator keberhasilan. Namun, kemitraan dalam penanganan masalah flu burung masih mengalami kendala yakni masing-masing pihak belum memahami konsep kemitraan pada penanganan flu burung secara menyeluruh. Masih ada anggapan bahwa kemitraan hanya merupakan hubungan yang sejajar, padahal ada faktor lain yaitu adanya keterbukaan dan saling menguntungkan. Penelitian ini berada pada jenjang aliansi,

yang mana bentuknya merupakan semi formal, ada beberapa sumber daya baru, dan adanya tugas didalamnya.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan karena dapat dijadikan sebagai landasan dan penguatan dalam melakukan penelitian ini. Selain itu, kemitraan yang dilakukan dalam upaya penanganan flu burung dapat dijadikan acuan dalam menganalisis kemitraan dalam penelitian mengenai anak jalanan. Sedangkan perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut membahas mengenai gambaran kemitraan lintas sektor dan organisasi di bidang kesehatan dalam upaya penanganan flu burung di bidang Komunikasi Komite Nasional Flu Burung dan Pandemi Influenza (Komnas FBPI), sedangkan penelitian ini membahas mengenai kemitraan antara pemerintah dan ikatan pekerja sosial masyarakat dalam menangani masalah anak jalanan di kota Yogyakarta.

C. Kerangka Berfikir

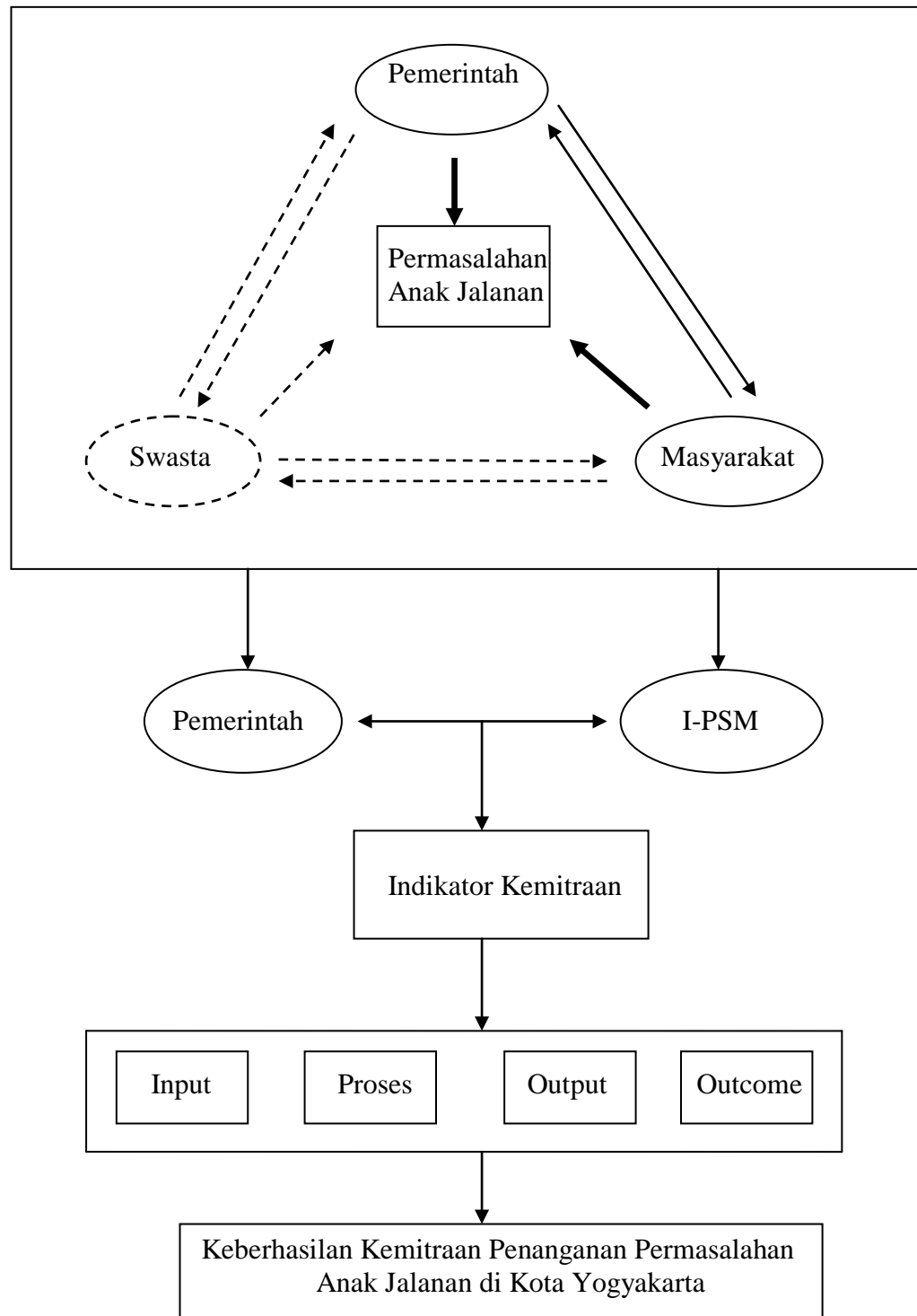
Kota Yogyakarta sebagai salah satu wilayah yang memiliki jumlah anak jalanan yang cukup banyak. Namun seiring waktu, jumlah anak jalanan justru semakin meningkat. Padahal di Kota Yogyakarta telah ada regulasi yang jelas yang menjadi landasan hukum dalam menangani anak jalanan di Yogyakarta yakni Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.

Selama ini dalam penanganan anak jalanan menunjukkan adanya beberapa permasalahan seperti adanya tindak kekerasan oleh pemerintah,

penanganan anak jalanan sasaranannya masih hanya anjal itu sendiri belum mencakup keluarga dan masyarakat, dan kurangnya sumber daya manusia dalam penanganan anak jalanan sehingga kurang fokusnya penanganan anak jalanan. Selain itu dalam penanganan anak jalanan hanya diberlakukan sistem satu arah, yakni dari pemerintah ke anak jalanan, dan tidak sebaliknya.

Dengan terjalannya kemitraan didasarkan pada konsep *good governance* dimana terjalannya interaksi aktor-aktor didalamnya. Masing-masing aktor tersebut mempunyai peran yang berbeda-beda sehingga saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain. Selain pemerintah sebagai aktor dominan, masyarakat dilihat mempunyai potensi dalam menangani masalah anak jalanan dibandingkan swasta. Salah satu organisasi sosial masyarakat yang menangani masalah anak jalanan di Kota Yogyakarta adalah Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM).

Dengan adanya kemitraan antara pemerintah dan IPSM diharapkan dapat menangani masalah anak jalanan menjadi lebih optimal, sehingga mendorong terciptanya *good governance*. Adapun keberhasilan kemitraan dalam menangani permasalahan anak jalanan dapat dilihat dari indikator input, proses, output dan outcome. Dengan keberhasilan penanganan anak jalanan akan mengurangi angka anak jalanan sehingga permasalahan sosial di kota Yogyakarta mampu terselesaikan. Berikut skema kerangka berpikir dalam penelitian ini:



Gambar 3. Kerangka Berpikir Peneliti